

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran politik organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam memberdayakan perempuan di tingkat desa, dengan fokus pada studi kasus PKK Desa Cijati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih terbatasnya representasi perempuan dalam pengambilan kebijakan desa, meskipun PKK aktif menjalankan berbagai program sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi politik perempuan melalui PKK, kegiatan yang dijalankan, hambatan yang dihadapi, dan bagaimana stakeholder memandang PKK sebagai aktor politik lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis dengan pendekatan teoritis Civic Voluntarism Model, partisipasi politik substantif, dan pemberdayaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK telah menjalankan berbagai kegiatan yang bersifat politis secara substantif, seperti pelatihan UP2K, kaderisasi Posyandu, dan advokasi layanan sosial. Namun, partisipasi PKK masih bersifat administratif dan tidak terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis desa. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas kader, budaya politik patriarkal, dan tidak adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah desa. Para stakeholder mengakui peran sosial PKK, namun belum menempatkan organisasi ini sebagai aktor politik yang sejajar dengan struktur kekuasaan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKK memiliki potensi sebagai aktor politik lokal berbasis komunitas, namun peran tersebut masih terhambat oleh struktur dan budaya yang belum inklusif. Perlu intervensi kebijakan dan penguatan kapasitas agar PKK mampu menjalankan peran politiknya secara lebih strategis dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: PKK, peran politik, pemberdayaan perempuan, desa, partisipasi substantif

ABSTRACT

This study examines the political role of the Family Welfare Empowerment (PKK) organization in empowering women at the village level, with a case study of PKK in Cijati Village, Cimanggu Subdistrict, Cilacap Regency. The research is motivated by the limited representation of women in village decision-making processes, despite the active involvement of PKK in various social and economic programs. The objective of this study is to analyze the forms of women's political participation through PKK, the activities carried out, the obstacles faced, and stakeholder perspectives regarding PKK as a local political actor. This research uses a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, documentation, and observation. The data were analyzed using theoretical frameworks including the Civic Voluntarism Model, substantive political participation, and women's empowerment theory. The results show that PKK has implemented various substantively political activities such as economic empowerment (UP2K), health service advocacy, and community-based social programs. However, PKK's participation remains administrative and has not been integrated into the strategic decision-making structure of the village. The challenges identified include limited capacity among PKK members, patriarchal political culture, and the absence of affirmative policies from the village government. Stakeholders acknowledge the social role of PKK but do not yet recognize it as a political entity on par with formal decision-making structures. The study concludes that PKK holds potential as a community-based local political actor, but this role is constrained by structural and cultural barriers. Strategic interventions, including policy reform and capacity building, are needed to strengthen PKK's political role in inclusive village development.

Keywords: PKK, political role, women's empowerment, village, substantive participation.